

MODEL PENILAIAN KUANTITATIF BANGUNAN CAGAR BUDAYA KOTA SURAKARTA

QUANTITATIVE VALUING MODEL OF HERITAGE BUILDINGS IN SURAKARTA CITY

Andi Putranto dan Dwi Pradnyawan

Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Jalan Sosio Humaniora 1 Bulaksumur, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta; posel: andi.fib@ugm.ac.id; dwi-pradnyawan@ugm.ac.id

Diterima 17 September 2018

Direvisi 27 September 2018

Disetujui 9 November 2018

Abstrak. Bangunan cagar budaya di Kota Surakarta merupakan peninggalan sejarah dari masa kolonial di Indonesia. Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, bangunan-bangunan tersebut dapat dikategorikan sebagai Bangunan Cagar Budaya jika telah melalui proses pendaftaran atau register, penilaian hingga ditetapkan sesuai dengan peringkatnya. Penilaian cagar budaya khususnya dari jenis bangunan dilakukan dalam rangka penyusunan rekomendasi untuk penetapan. Bentuk penilaian tersebut belum banyak diketahui mekanismenya. Penelitian ini melakukan cara penilaian dengan menggunakan metode analisis kuantitatif berjenjang dengan faktor pembobot. Proses perolehan hasil akhir dari penilaian dilakukan dengan menggunakan algoritma matematika, sehingga proses penilaian dapat terlihat dalam satu rangkaian proses yang berurutan dan sistematis. Hasil penilaian dengan model penilaian tersebut digunakan untuk memperoleh nilai akhir bagi sebuah bangunan dalam bentuk kelas rekomendasi untuk penetapan bangunan cagar budaya. Dalam penelitian ini diajukan empat kelas, yaitu kelas bangunan dengan tidak atau kurang direkomendasikan, kelas bangunan direkomendasikan dengan level cukup, kelas bangunan direkomendasikan dengan level kuat, dan kelas bangunan yang direkomendasikan dengan level mendesak. Keempat level ini berkaitan erat dengan skala prioritas dalam rangkaian kegiatan penetapan sebagai bangunan cagar budaya. Penelitian ini menghasilkan nilai yang bersifat kuantitatif dan terukur secara ilmiah dan memberikan dinamika positif dalam cara penilaian bangunan untuk penetapan cagar budaya.

Kata kunci: bangunan cagar budaya, kolonial, pelestarian, metode kuantitatif, faktor pembobot, algoritme

Abstract. Cultural heritage buildings in Surakarta are historical relics from Indonesian colonial period. The law number 11, year 2010 of the Republic of Indonesia concerning and cultural archaeological preservation and management classifies these buildings as Cultural Heritage Building, after passing through multiple registration process. The assessment of cultural heritage nomination, especially based on types of building, is carried out in the framework of preparing recommendations for its establishment. Unfortunately, the assesment mechanism has not been widely understood. This study carried out the evaluation using a tiered quantitative analysis method with a weighing factor. The process to obtain final assessment results is achieved by using a mathematical algorithm. The assessment process can be visually observed in sequential and systematic processes. By using this method, the assesment results a formula that can be used to obtain the final value for a building which classified into several recommendations for the establishment of a cultural heritage building. The study claims that at least here are four classes of recommendation levels; building classes with no or less recommended, recommended building classes with sufficient levels; recommended building classes with strong levels; and recommended building classes with urgent levels. These four levels are closely related to a priority scale in a set of activities as a cultural heritage building. This research produces values that are quantitatively and scientifically measured and provides positive dynamics in the way of valuing buildings for the establishment of cultural heritage.

Keywords: colonial heritage buildings, preservation, quantitative model, weighing factor, algorithm.

PENDAHULUAN

Kegiatan pelestarian Cagar Budaya dari jenis bangunan khususnya dari periode kolonial di Indonesia lebih banyak dilakukan terkait dalam kerangka kegiatan pengelolaan sumber daya budaya bendawi atau *Cultural Resource Management* (CRM) untuk berbagai keperluan. Berbagai keperluan yang berkaitan dengan pelestarian bangunan cagar budaya dari masa kolonial di antaranya adalah pendaftaran (registrasi), penilaian hingga dilakukannya penetapan sebagai bentuk dokumen legal sebagai Cagar Budaya yang wajib dilindungi dan dilestarikan.

Selama ini penentuan kriteria bangunan cagar budaya khususnya dari masa kolonial memang sudah dilakukan dengan menggunakan beberapa variabel sebagai dasar penyusunannya, meskipun tidak terpublikasikan karena berupa dokumen pelengkap. Kendala utamanya bukan terletak pada variabel yang digunakan sebagai dasar penyusunan kriteria tersebut, tetapi lebih kepada proses penilaiannya yang akan berdampak kepada cara analisis selanjutnya, untuk memberi rekomendasi sejauh mana bangunan cagar budaya layak dan memenuhi syarat sebagai cagar budaya.

Berdasarkan pengamatan dalam mengikuti beberapa kegiatan, selama ini penilaian terhadap kriteria bangunan cagar budaya lebih bersifat kualitatif yang cenderung sulit untuk diolah untuk memperoleh nilai yang komprehensif. Dengan menggunakan model penilaian yang bersifat kuantitatif maka tiap variabel yang menyusun kriteria tersebut akan dapat diolah secara matematis dan menggunakan statistik sederhana tetapi menghasilkan suatu nilai mutlak yang lebih rasional, logis, dan komprehensif. Sejauh manakah metode penilaian dengan model analisis kuantitatif berjenjang dengan faktor pembobot dapat diterapkan untuk menentukan nilai bangunan cagar budaya di Kota Surakarta?

Penelitian ini dilakukan untuk mencoba menerapkan model pendekatan kuantitatif dalam memberikan penilaian terhadap kriteria-kriteria dalam bentuk variabel amatan yang disusun untuk

menentukan nilai sebuah bangunan yang diduga termasuk kategori cagar budaya.

Surakarta merupakan kota yang penting dan termasuk dalam daerah *vorstenlanden* bersama dengan Yogyakarta (Kuntowijoyo 2000:139-146). Kota Surakarta dipilih karena dianggap cukup banyak memiliki tinggalan bangunan cagar budaya dari periode kolonial, serta peranan pemerintah daerah yang cukup besar dalam melakukan kegiatan penilaian dan penetapan terhadap bangunan cagar budaya. Hal ini diharapkan dapat mendorong para *stakeholder* terutama pemangku kebijakan di kota-kota lain yang memiliki peninggalan bangunan dari masa kolonial dan memiliki nilai penting untuk dapat diajukan sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi oleh undang-undang.

METODE

Instrumen dan Algoritme Matematika Penilaian

Dalam penelitian ini disusun instrumen penilaian terhadap variabel atau kriteria yang dapat diamati pada objek penelitian. Instrumen yang disusun berbasis pada model penilaian bangunan yang telah dibuat oleh Harold Kalman (Kalman 1980: 8-10) dan digunakan di Amerika Serikat pada tahun 1980 an.

Instrumen penilaian yang disusun berdasarkan model tersebut di atas dilakukan modifikasi atau penyesuaian, mengingat model tersebut digunakan di negara yang berbeda dengan di Indonesia, serta model matematika penilaian yang dipandang cenderung lebih kepada *common sense* atau subjektif menurut orang yang menjadi penilai. Oleh karena itu, dicoba untuk melakukan modifikasi dengan menerapkan model matematika untuk penghitungan nilai akhir yang digunakan dalam bidang kajian spasial untuk penilaian lahan yang biasa dikenal dengan analisis kuantitatif berjenjang dengan faktor pembobot (Hardjowigeno dan Widiatmoko 2011: 206; Putranto 2015a: 30).

Kriteria penilaian yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. **Arsitektur** dengan detail kriteria yang dinilai meliputi gaya, konstruksi, periode atau umur, arsitek, desain, dan interior.
2. **Kesejarahan** dengan detail kriteria yang dinilai meliputi keterkaitan dengan tokoh, peristiwa bersejarah, konteks kesejarahan.
3. **Lingkungan** dengan detail kriteria yang dinilai meliputi: keberlanjutan, tata letak, simbol atau *landmark*.
4. **Pemanfaatan** dengan detail kriteria yang dinilai meliputi: kesesuaian, adaptasi, publik, utilitas, pembiayaan.
5. **Integritas dan Autentisitas** dengan detail kriteria yang dinilai meliputi situs (kedudukan), alterasi (pengubahan), kondisi struktur.

Masing-masing kriteria akan diberi skor atau nilai dari 1 sampai 4 pada tiap detail kriterianya. Angka 1-4 secara kualitatif melambangkan perbedaan nilai dari rendah ke yang paling tinggi. Sesuai dengan metode analisis kuantitatif berjenjang dengan faktor pembobot, maka tiap kriteria di atas akan diberi nilai bobot. Bobot perlu dijelaskan disini berbeda dengan skor (Putranto 2015b: 3-5).

Bobot yang akan diberikan dalam penelitian ini adalah 1 dan 2. Pertimbangan penentuan bobot ini dilakukan secara subjektif oleh peneliti berdasarkan atas pendekatan teoritik dan pengalaman selama ini dalam penilaian objek termasuk bangunan kolonial. Idealnya terdapat beberapa cara yang lebih komprehensif dalam menentukan faktor pembobot dan nilai bobot yaitu:

1. Penelitian tersendiri, khusus untuk memperoleh faktor pembobot dan nilai bobot
2. Memanfaatkan hasil penelitian dari peneliti lain khusus mengenai faktor pembobot dan nilai bobot yang pernah dilakukan dalam penelitian yang sejenis.
3. Menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden terpilih yang diambil dari kalangan pakar, praktisi yang memiliki perhatian tinggi dan berpengalaman terhadap bangunan cagar budaya khususnya dari masa kolonial, sehingga dapat menjangkau pandangan mereka terhadap faktor pembobot dan membantu merumuskan nilai bobot.

4. Justifikasi peneliti dengan catatan telah memiliki banyak pengalaman dalam melakukan kajian atau penelitian dengan pembobotan.

Atas beberapa pertimbangan maka dalam penelitian menggunakan justifikasi dari peneliti.

Tabel 1 Kriteria/Variabel Penelitian

No	Kriteria/Variabel Penilaian	Nilai Bobot
1	Arsitektur	2
2	Kesejarahan	2
3	Lingkungan	1
4	Pemanfaatan	1
5	Integritas dan Otentisitas	2

Sumber: Hasil Analisis Penulis

Perbedaan dari nilai bobot di atas juga disesuaikan dengan tujuan dari penilaian tersebut, yaitu untuk memperoleh nilai akhir dari suatu bangunan kolonial untuk keperluan rekomendasi penetapan cagar budaya. Dalam hal ini variabel lingkungan dan pemanfaatan memperoleh bobot yang paling kecil dibanding variabel lainnya. Untuk keperluan penilaian dengan tujuan berbeda, sangat mungkin dan dapat dipastikan akan terdapat perbedaan nilai bobot yang menyesuaikan dengan tujuan penilaian yang dilakukan.

Dalam penelitian yang lebih komprehensif, penentuan nilai bobot dapat juga dilakukan oleh masing-masing pakar yang berkompeten dalam bidangnya, sehingga akan memberikan hasil yang lebih komprehensif dan akurat. Selanjutnya, keseluruhan penilaian dan nilai bobot yang telah ditentukan akan dihitung dengan model matematika (algoritme) menggunakan rumus berikut ini:

$$HKB=(HVA*PB)+(HVB*PB)+(HVC*PB)+(HVD*PB)+(HVE*PB)$$

HKB: Nilai Total Bangunan; HVA: Nilai Variabel Arsitektur; HVB: Nilai Variabel Kesejarahan; HVC: Nilai Variabel Lingkungan; HVD: Nilai Variabel Pemanfaatan; HVE: Nilai Variabel Integritas dan Otentisitas; PB: Bobot

Selanjutnya, Nilai Total Bangunan dari tiap-tiap bangunan kolonial yang dinilai akan dibuatkan

klas interval dari rentang nilai total terendah hingga tertinggi dan dibagi dalam empat kelas interval. Nilai total akhir terendah adalah 32 dan kelas tertinggi adalah 128, maka diperoleh jarak interval kelas yang akan dibagi menjadi empat kelas, yaitu Kelas Kurang atau Tidak Direkomendasikan; Kelas direkomendasikan untuk ditetapkan dalam level Cukup; Kelas direkomendasikan untuk ditetapkan dalam level Kuat; dan Kelas direkomendasikan untuk ditetapkan dalam level Mendesak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah dan Perkembangan Kota Surakarta

Surakarta atau Solo didirikan pada sekitar tahun 1745 oleh Sunan Pakubuwono (PB) II sebagai pengganti Kartasura yang telah “hancur” dan dipandang kurang memadai dalam perkembangan yang terjadi pada saat itu (Padmo 2007: 2-5). Luas wilayah meliputi lahan seluas 6.213 km² dengan demografi penduduknya berjumlah 358.230 jiwa pada tahun 1836, kemudian berkembang pesat menjadi 2.049.547 jiwa pada tahun 1920. Komposisi penduduknya termasuk *multietnik* yaitu tercatat pada tahun 1900 terdapat 1.973 jiwa etnis Eropa, 5.129 jiwa etnis Cina, 171 jiwa etnis Arab, dan 262 jiwa etnis Timur lainnya. Sehingga, pada tahun tersebut untuk wilayah Kota Surakarta saja terdapat total 109.459 jiwa (Kuntowijoyo 2000:139-146). Surakarta bersama Yogyakarta merupakan daerah *vorstenlanden* atau wilayah otoritas kerajaan yang merupakan pewaris dari Dinasti Mataram Islam. Mulai abad ke-18 M, wilayah dan kekuasaan Mataram Islam mengalami perpecahan dan pembagian yang menjadi permanen, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Jogjakarta (1755), Kadipaten Mangkunegaran (1757) serta Kadipaten Pakualaman (1813) (lihat gambar 1).

Kota Surakarta memiliki tiga wilayah dengan batas-batas (*wijk*) yang telah ditetapkan oleh pemerintah kolonial Belanda serta dipimpin seorang administrator (*chief*). Wilayah Timur-Selatan, meliputi wilayah yang dibatasi oleh Sungai Pepe di sebelah utara, Sungai Bengawan

Surakarta di sebelah timur, batas pinggiran kota di sebelah selatan, dan jalan yang melintasi Sungai Pepe hingga Istana Mangkunegaran. Wilayah Timur-Utara, meliputi wilayah yang dibatasi dengan pinggiran kota sisi utara, Sungai Bengawan Surakarta di sebelah timur, Sungai Pepe di sebelah selatan dan barat. Wilayah Barat, wilayah ini dibatasi dengan batas kota paling utara dengan Sungai Pepe untuk batas utaranya, jalan yang melintasi jembatan Sungai Pepe hingga selatan Istana Mangkunegaran untuk batas timur, pinggiran selatan kota sebagai batas selatannya, dan pinggiran barat kota untuk batas baratnya (Kuntowijoyo 2000: 139-146). Selain itu masih terdapat *wijk* lain berdasarkan atas etnis yang bermukim di dalamnya seperti etnis Cina di Jebres, Kepatihan, Balapan serta di sepanjang jalan jalan utama Kota Surakarta, etnis Arab di Pasar Kliwon.

Perkembangan wilayah Kasunanan Surakarta dan khususnya Kota Surakarta tidak dapat dilepaskan dari perubahan kebijakan politik pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1870 muncul yang disebut *Agrarian Act* (Undang undang Agraria), yang mendorong melonjaknya perekonomian khususnya di wilayah *vorstenlanden* termasuk Surakarta (Padmo 2007: 4-5; Roosmalen 2003: 123). Kebijakan ini menyebabkan perkembangan yang positif bagi usaha perkebunan swasta di Indonesia, khususnya di wilayah Surakarta. Tercatat terdapat sepuluh perusahaan perkebunan swasta dengan komoditas perkebunan, yaitu tembakau, indigo, gula, kopi, dan serat (Padmo 2007: 3).

Perkembangan Kota Surakarta atau Solo lambat laun berkembang pesat seiring dengan makin banyaknya kalangan swasta asing yang mendirikan perusahaan perkebunan dan bermukim di kota tersebut. Fasilitas kota yang modern banyak mulai dibangun, seperti sarana pengairan pengendali banjir, jaringan listrik, jaringan jalan, jalan kereta api, pusat perekonomian, pemukiman dan fasilitas hiburan seperti hotel, bioskop, dan klub malam (Kuntowijoyo 2000: 139-146). Fasilitas-fasilitas modern ini membuat orang asing yang tinggal



Sumber: Bruggen dan Wassing 1998: 153, dengan modifikasi

Gambar 1 Sebagian Wilayah Kota Surakarta Tahun 1857

di Surakarta merasa tetap berada di negara asalnya (lihat gambar 2, 3, dan 4).

Banyaknya potensi warisan budaya dan juga cagar budaya di Kota Surakarta, menyebabkan kajian yang dilakukan terkait dengan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya menjadi sangat menarik. Seiring dengan perjalanan waktu, Kota Surakarta mengalami perkembangan dan juga perubahan yang membawa dampak kelestarian warisan dan cagar budayanya. Ada banyak kondisi terkait dengan warisan dan cagar budaya di Kota Surakarta, seperti bangunan-bangunan yang tidak mendapat perawatan memadai, dirubah hingga dijual yang berdampak pada perubahan-perubahan yang tidak dapat dikendalikan atau tanpa mengindahkan prinsip-prinsip pelestarian cagar budaya. Tidak sedikit bangunan-bangunan yang memiliki identitas sejarah yang kuat mengalami perubahan-perubahan yang menghilangkan identitasnya. Namun, tidak sedikit pula bangunan warisan dan cagar budaya yang dikelola dan tetap dilestarikan dengan baik.



Sumber: Bruggen dan Wassing 1998: 158

Gambar 2 Jalur kereta api Surakarta-Wonogiri di Jl. Slamet Riyadi tahun 1951



Sumber: Bruggen dan Wassing 1998: 171

Gambar 3 Gedung Bioskop Pasar Pon pada tahun 1934



Sumber: Rusdiyana 2008

Gambar 4 Javasche Bank (sekarang Bank Indonesia)

Penelitian ini secara khusus difokuskan pada cagar budaya di wilayah Kota Surakarta yang menurut penulis mengalami dampak yang penting dari pembangunan yang sangat dinamis di Kota Surakarta. Perhatian diarahkan hanya pada beberapa cagar budaya peninggalan masa kolonial yang telah ditetapkan menjadi cagar budaya, menjadi *landmark* di pusat Kota Surakarta, dan kemudahan aksesibilitas untuk dapat mengamati cagar budaya sehingga dapat diperhatikan kekhasan identitas dari masing-masing cagar budaya tersebut. Cagar budaya bangunan yang diamati adalah lima bangunan yang khas, yakni Gedung Eks Hotel Yuliana (Kantor *Corps Polisi Militer* (CPM) Kota Surakarta), Gedung Eks Brigif 6 (dimanfaatkan pihak swasta); Benteng Vastenburg, Loji Gandrung (Rumas Dinas Walikota Surakarta), dan Gereja St. Antonius Purbayan. Kelima cagar budaya yang diamati memiliki sejarah yang khas serta kondisi pengelolaan yang menarik untuk diamati lebih mendalam.

Gedung Eks Hotel Yuliana (Kantor CPM Kota Surakarta) (lihat gambar 5 dan 6). Jauh sebelum



Sumber: Dok. Tim Penelitian Surakarta 2016
Gambar 5 Façade atau Tampak Depan dari Gedung Eks Hotel Yuliana.



Sumber: Dok. Tim Penelitian Surakarta 2016
Gambar 6 Detail Pintu dan Jendela ala Indis yang Lebar.

bangunan ini dimiliki dan dikelola oleh Mabes TNI yang kemudian dipakai sebagai Kantor *Corps Polisi Militer* (CPM) Kota Surakarta, bangunan ini merupakan hotel yang bernama Hotel Yuliana.

Pada akhir pendudukan Jepang, pada tahun 1945, hotel ini berubah fungsi menjadi markas pemuda dan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah itu hotel ini dipergunakan sebagai markas Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kota Surakarta sampai saat ini.

Menurut penuturan para petugas CPM, ahli waris dari pemilik Hotel Yuliana yang bermukim di Belanda, beberapa kali pernah datang untuk melihat dan bernostalgia dengan bangunan tua yang dikelola dan dimiliki oleh para pendahulunya.

Secara umum bangunan ini masih terjaga dan terawat, baik detail kusen, hiasan kaca patri, jendela, pintu, atap kayu, serta bekas lorong kamar-kamar hotel yang kini dipergunakan sebagai ruang kerja. Di bagian belakang masih ditemui bekas tungku cerobong dari bata yang dulu mungkin dipakai sebagai dapur masak hotel. Bagian inti bangunan terdiri dari dua tingkat. Pada masanya hotel ini terletak pada kawasan inti Kota Surakarta yang selalu ramai dan diperuntukan untuk kalangan atas. Bangunan bergaya arsitektur kolonial tahun 1900-1920an.

Gedung Eks Brigif 6 (lihat gambar 7 dan 8). Gedung ini dibangun pada tahun 1876 dan diselesaikan 1880-an sebagai pelengkap bangunan Benteng Vastenburg yang berfungsi sebagai asrama dan tempat pendidikan anak-



Sumber: Dok. Tim Penelitian Surakarta 2016
Gambar 7 Façade Bangunan Bagian Tengah Eks Brigif 6.



Sumber: Dok. Tim Penelitian Surakarta 2016
Gambar 8 Ruang Lantai 1 Sayap Barat yang Dimanfaatkan Sebagai Restoran.

anak Belanda. Pada tahun 1900 difungsikan sebagai balai pengobatan. Pada tahun 1940-an dipakai sebagai kantor *Kleine Staf en Observation*

Pada tahun 1942 dikuasai oleh tentara Jepang. Pada tahun 1945-1948 dipakai sebagai markas Resimen Infanteri 26. Pada tahun 1952 dipakai sebagai markas Resimen Infanteri 15 dipimpin oleh Soeharto (Presiden Soeharto kemudian). Pada tahun 1961-198 gedung tersebut dipakai sebagai markas Brigade Infanteri 6/2 Konstrad. Pada tahun 1990 Dewan Harian Cabang (DHC) 45 Surakarta mengajukan untuk menempati gedung Eks Brigif sebagai kantor. Pada tahun 2014 dilakukan rehabilitasi gedung oleh Kodam IV Diponegoro, Jawa Tengah dan pada tahun 2015 dipergunakan sebagai tempat kuliner dan penjualan tas. Bangunan yang memiliki gaya arsitektur kolonial 1900 awal merupakan bangunan yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia-Angkatan Darat (TNI-AD). Secara umum, walau telah mengalami perbaikan dan juga perubahan-perubahan kecil, bentuk asli dan sebagian besar material bangunan masih asli dan terjaga kondisinya.

Benteng Vastenburg (lihat gambar 9 dan 10) didirikan 1745 atas perintah Gubernur Jenderal Baron Van Imhoff sebagai bentuk pengawasan kekuasaan Sunan Surakarta. Bangunan benteng didirikan dalam beberapa tahap hingga selesai tahun 1779. Bangunan Vastenburg berfungsi sebagai benteng dan barak militer VOC dan Hindia Belanda sampai kedatangan Tentara Jepang ke Indonesia.

Setelah tentara Jepang mundur dari Indonesia, Benteng Vastenburg diambil alih oleh



Sumber: Dok. Penelitian Surakarta 2016

Gambar 10 Bagian Depan Vastenburg 2016

TNI. Pada periode 1990 terjadi perubahan hak milik atas beberapa bagian wilayah benteng yang mengakibatkan hancurnya bangunan-bangunan yang berada di dalam benteng. Benteng Vastenburg memiliki gaya arsitektur benteng kolonial VOC-Indis Periode 1740-1770an.

Loji Gandrung (lihat gambar 11 dan 12) pada awalnya merupakan rumah seorang terkemuka Belanda yang bernama Johannes Agustinus Dezentje, seorang pengusaha terkemuka.

Loji Gandrung bukan merupakan rumah satu-satunya Dezentje, namun kerap dipergunakan sebagai tempat bersenang-senang jika tinggal di Surakarta, sehingga dinamakan loji (rumah) *gandrung* (bersenang-senang). Loji Gandrung menjadi rumah Dezentje hingga meninggalnya pada tahun 1839. Selepas itu Loji Gandrung dimiliki oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Pada zaman kemerdekaan Republik Indonesia (RI), rumah ini diambil alih untuk kepentingan militer RI. Pada masa Agresi Militer



Sumber:KITLV 1990

Gambar 9 Vastenburg Circa 1900



Sumber: Dok.Tim Penelitian Surakarta 2016

Gambar 11 Bagian Depan Façade Loji Gandrung



Sumber: Dok. Tim Penelitian Surakarta 2016
Gambar 12 Bagian Dalam Ruang Loji Gandrung Dengan Pintu dan Jendela Berhias Kaca Patri



Sumber: Dok. Tim Penelitian Surakarta 2016
Gambar 14 Bagian Dalam Interior Gereja Purbayan.

Belanda II, rumah ini menjadi pusat komando Kolonel Gatot Subroto untuk menyusun strategi melawan Belanda. Pada tahun 1949, rumah ini menjadi markas Letkol Slamet Riyadi ketika terjadi Serangan Umum Surakarta 1949. Presiden pertama RI Soekarno juga pernah berkunjung dan menginap di Loji Gandrung ini.

Saat ini Loji Gandrung menjadi rumah dinas Walikota Surakarta. Loji Gandrung memiliki gaya arsitektur Indis, Neo-Klasik, Kolonial Hindia Belanda rentang 1780 hingga 1900-an.

Gereja St Antonius Purbayan (lihat gambar 13 dan 14), sejarahnya dimulai jauh sebelum tahun 1900, di mana pada saat itu pelayanan gereja di Kota Surakarta dilayani langsung gereja dari Semarang (Paroki St Yusuf Gedangan). Kemudian tahun 1859 mulai dibuka paroki di luar Semarang, yaitu di Ambarawa. Pembangunan gereja Purbayan ini dimulai pada tahun 1905, saat seorang pastor bernama C. Stiphout, SJ, memperoleh izin mengadakan semacam undian bagi pembangunan gereja dan usaha ini berhasil. Pada tahun 1987 pernah dilakukan renovasi yang membuat bangunan ini lebih luas pada sisi selatan

bangunan hingga tampak seperti saat ini. Penggantian beberapa komponen bangunan juga dilakukan berkaitan dengan adanya perluasan sisi selatan bangunan gereja. Di antaranya penambahan pintu masuk di sisi selatan yang menyesuaikan dengan pintu masuk yang ada di sisi utara bangunan, berikut kaca patrinya. Bagian belakang juga dinaikkan lantainya karena diperluas memanjang ke belakang. Gereja St. Antonius Purbayan memiliki gaya arsitektur campuran Art Nouveau, Art Deco, dan Nieuwe Bouwen.

Hasil Penelitian

Bangunan kolonial kota Surakarta yang dijadikan sampel penelitian terdiri atas lima bangunan, yaitu Markas Denpom Surakarta (ex Hotel Yuliana), Gereja Santo Antonius Purbayan, Benteng Vastenburg, Gedung ex Brigif 6 Surakarta, dan Loji Gandrung. Kelima bangunan tersebut telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, baik oleh Pemerintah Kota Surakarta (Regional) maupun oleh Pemerintah Indonesia (Nasional).

Dari hasil penilaian terhadap kriteria atau variabel penilaian terhadap kelima bangunan kolonial di Kota Surakarta, dan setelah dilakukan penghitungan dengan model matematika, maka diperoleh nilai total akhir yang dapat dilihat pada tabel 2.

Setelah diperoleh nilai total akhir dari masing-masing bangunan kolonial yang menjadi objek penilaian dalam penelitian ini, maka hasilnya akan dikelompokkan ke dalam kelas nilai interval yang telah diperoleh sebelumnya, yang dapat dilihat pada tabel 3.



Sumber: Dok. Tim Penelitian Surakarta 2016
Gambar 13 Façade Bagian Depan

Tabel 2 Hasil Penelitian Terhadap Kriteria/Variabel Penelitian

No	Nama Bangunan	Nilai Total Akhir
1	Kantor CPM Surakarta (ex Hotel Yuliana)	89
2	Gereja St. Antonius Purbayan	82
4	Benteng Vastenburg	74
5	Ex Brigif 6 Surakarta	101
6	Loji Gandrung	105

Sumber: Hasil Analisis Penulis

Tabel 3 Kelas Nilai Interval

Kelas Interval	Keterangan
32-56	Kurang atau Tidak direkomendasikan untuk ditetapkan
57-81	Direkomendasikan untuk ditetapkan dengan Level Cukup
82-106	Direkomendasikan untuk ditetapkan dengan Level Kuat
107-128	Direkomendasikan untuk ditetapkan dengan Level Mendesak

Sumber: Hasil Analisis Penulis

Pembagian kelas interval di atas apabila diterapkan untuk bangunan kolonial di manapun berada tidak terkecuali di Surakarta akan berdampak pada peringkat prioritas penetapan statusnya sebagai bangunan cagar budaya. Bangunan yang telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya akan memperoleh konsekuensi baik secara aspek legal maupun aspek lainnya. Merujuk pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya disebutkan bahwa bangunan yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya maka akan memperoleh perlindungan secara hukum dari tindakan perusakan, penghilangan, pencurian, pengubahan dan sebagainya sebagaimana diatur di dalam pasal-pasal-pasal (Balai Konservasi Borobudur 2014: 48-49). Selain itu, bangunan cagar budaya juga dimungkinkan memperoleh kompensasi atas penetapannya yang diatur oleh peraturan lain yang berlaku di tiap-tiap daerah sesuai peringkatnya.

Kelas dari tiap bangunan kolonial di Kota Surakarta jika didasarkan atas hasil penilaian dengan metode tersebut dapat dilihat pada tabel 4. Tabel 4 menunjukkan empat dari lima bangunan

Tabel 4 Hasil Penilaian Cagar Budaya

No	Nama Bangunan	Nilai Total Akhir	Kelas Interval	Keterangan
1	Kantor CPM	89	82-106	Direkomendasikan untuk ditetapkan Level Kuat
2	Surakarta Gereja St. Antonius Purbayan	82	82-106	Direkomendasikan untuk ditetapkan Level Kuat
3	Benteng Vastenburg	74	57-81	Direkomendasikan untuk ditetapkan Level Cukup
4	Ex- Brigif Surakarta	101	82-106	Direkomendasikan untuk ditetapkan Level Kuat
5	Loji Gandrung	105	82-106	Direkomendasikan untuk ditetapkan Level Kuat

Sumber: Hasil Analisis Penulis

kolonial di Kota Surakarta yang dijadikan objek penilaian termasuk ke dalam kelas 'Direkomendasikan dengan Level Kuat' untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Keempat bangunan tersebut adalah :

1. Markas Denpom Surakarta
2. (ex hotel Yuliana)
3. Gereja Santo Antonius Purbayan
4. Gedung ex markas Brigif Surakarta
5. Loji Gandrung

Diperoleh hasil ada satu bangunan era kolonial, termasuk ke dalam kelas 'Direkomendasikan dengan Level Cukup' untuk ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya, yaitu Benteng Vastenburg.

Untuk empat bangunan yang berada dalam Level Kuat, kebetulan pada saat ini memang telah ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya dengan Surat Penetapan dari Pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini oleh Walikota Surakarta.

Markas CPM Surakarta (ex Hotel Yuliana)

Bangunan ini memiliki nilai atau skor tertinggi 4 pada variabel gaya dan konstruksi (arsitektur) dimana kedua variabel ini tampak pada bangunan tersebut yang ditunjukkan dengan

gaya arsitek yang kuat bercirikan kolonial yang khas dengan konstruksi yang istimewa dan masih hampir seluruhnya dapat diamati pada bangunan tersebut. Selain itu, pada variabel lingkungan juga memperoleh skor 4 karena lingkungan di sekitar bangunan tersebut memang merupakan lingkungan yang sejak zaman kolonial hingga sekarang menjadi pusat urat nadi Kota Surakarta dan bangunan tersebut menjadi bagian tak terpisahkan di dalamnya.

Dari variabel integritas dan autentisitas, bangunan markas ini juga memperoleh skor tertinggi, yaitu 4 karena memang masih asli, orisinal pada hampir semua komponen bangunan yang masih dapat diamati. Hanya terdapat sedikit sekali perubahan pada halaman samping dan belakang yang menjadi area parkir dan garasi kendaraan dinas polisi militer. Skor terendah, yaitu 1 diperoleh pada bangunan ini pada variabel arsitek, tokoh dan pembiayaan, dimana arsitek perencana tidak dikenal, kemudian fungsi bangunan pada masa lalu sebagai hotel, sehingga sulit diketahui keterkaitan dengan seorang tokoh dan aktivitasnya dalam sejarah. Dari segi pembiayaan juga demikian, dikarenakan bangunan ini masih sangat autentik di hampir seluruh komponen bangunannya, tetapi dari sisi pembiayaan akan lebih mahal dari perawatan bangunan baru karena harus mempertahankan orisinalitas yang masih ada. Sumber dana pembiayaan untuk pemeliharaan pun sampai saat ini sangat minim karena pihak pemilik bangunan tidak memiliki anggaran khusus untuk perawatan dan pemeliharaan bangunan.

Gereja Santo Antonius Purbayan

Bangunan ini memperoleh skor tertinggi, yaitu 4 pada variabel penilaian lingkungan, yaitu keberlanjutan dan letak. Terletak pada lokasi yang menjadi pusat kegiatan Kota Surakarta pada masa kolonial dan sekarang pun masih menjadi pusat perekonomian kota. Selain itu bangunan gereja juga hingga saat ini tidak berubah fungsinya sejak dari dulu dengan fungsi keagamaan. Variabel konstruksi memperoleh skor tertinggi karena memang kondisinya sangat terawat dengan baik.

Skor rendah dimiliki bangunan gereja ini pada variabel autentisitas, di mana telah cukup banyak dilakukan perubahan pada konstruksi dan bentuk bangunan hingga ke bagian interior, tetapi komponen utama bangunan masih tampak menunjukkan orisinalitasnya.

Bangunan ex Markas Brigif 6 Surakarta

Bangunan ini memperoleh skor tertinggi pada variabel gaya, arsitek, keberlanjutan, adaptasi pemanfaatan dan fasilitas serta masih berada pada posisi aslinya. Bangunan ini memiliki gaya arsitektur yang khas gaya imperialis yang mencerminkan gaya yang khas bangunan militer, dimana pada waktu itu bersama dengan keberadaan benteng Vastenburg bangunan ini menjadi komponen pendukung sebagai tangsi militer. Selain itu di sisi timur keduanya terdapat kompleks pemukiman orang asing yang harus dijaga keamanannya sekaligus menjaga dan mengawasi keraton Kasunanan di sebelah selatan. Keadaan bangunan pada saat ini difungsikan sebagai restoran dan toko *fashion* tanpa melakukan ubahan yang signifikan pada bagian eksterior dan interior patut mendapatkan skor tinggi.

Skor terendah adalah 2 yang diperoleh pada variabel interior karena memang ada sedikit ubahan dan pernah mengalami kerusakan pada bangunan sebelah timur di lantai dua. Variabel pembiayaan juga memperoleh skor rendah yaitu 2 karena pengelola bangunan saat ini adalah pihak swasta yang harus mengeluarkan biaya perawatan yang tinggi dengan sistem hak guna bangunan dalam jangka waktu tertentu.

Dikhawatirkan beban biaya akan makin berat apabila pendapatan dari pemanfaatan bangunan sebagai toko *fashion* dan restoran tidak dapat lagi memadai untuk perawatan dan pemeliharaan bangunan.

Loji Gandrung

Bangunan ini memperoleh skor tertinggi 4 pada variabel penilaian gaya, konstruksi, dan desain. Dari sisi arsitekturalnya, bangunan ini khas mencerminkan gaya kolonial atau indis yang merupakan gaya adaptasi antara bangunan Eropa

dengan kondisi iklim di wilayah Indonesia. Ciri tersebut masih tampak dengan jelas pada bangunan ini dan dalam kondisi yang masih orisinal serta terintegrasi dengan komponen bangunan lain.

Dari sisi kesejarahan tokoh yang pernah tinggal di Loji Gandrung, skor tertinggi diberikan karena Loji Gandrung merupakan bangunan yang dibangun dan dimiliki oleh seorang Belanda bernama Johannes Augustinus Dezentje yang merupakan seorang pemilik perkebunan swasta terbesar di Jawa Tengah khususnya di wilayah *vorstenlanden* Surakarta pada kurun waktu abad ke 18 M. Tokoh ini termasuk sangat dikenal dan berpengaruh.

Variabel pemanfaatan banyak memperoleh skor tertinggi, yaitu 4 karena secara adaptasi dan fasilitas berfungsi sebagai rumah dinas walikota Surakarta tanpa banyak melakukan perubahan baik pada eksterior maupun interior bangunan. Pembiayaan memperoleh skor rendah, yaitu 2 karena memang memerlukan biaya pemeliharaan dan perawatan yang tidak jauh berbeda dengan bangunan baru.

Bangunan Loji Gandrung nyaris tidak banyak diubah, serta masih menempati lokasi yang sama (*in situ*) sama saat ketika dibangun. Tetapi secara lansekap mikro, telah ada perubahan berupa penambahan bangunan baru di sayap kiri dan pembangunan joglo baru di halaman belakang, dimana hal ini menyebabkan skornya cukup rendah, yaitu 2 untuk variabel ubahan.

Benteng Vastenburg

Dalam penelitian ini, hasil nilai akhir dan kelas rekomendasi benteng ini memberikan hasil yang cukup berbeda dengan kenyataan. Dimana bangunan Benteng Vastenburg ini telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dengan peringkat nasional dimana surat penetapannya langsung ditanda tangani oleh menteri.

Peringkat bangunan cagar budaya peringkat nasional termasuk peringkat yang tinggi apabila dibandingkan dengan keempat bangunan cagar budaya lainnya dalam penelitian ini. Hal ini tentu

perlu menjadi satu perhatian tersendiri, mengingat diperoleh hasil yang berbeda dengan menggunakan model penilaian ini. Ada kemungkinan pada saat dilakukan penilaian untuk rekomendasi penetapan terhadap benteng ini menggunakan metode atau cara penilaian yang berbeda yang tidak diketahui oleh peneliti.

Hasil nilai total akhir dari penilaian Benteng Vastenburg memasukkannya ke dalam kelas Direkomendasikan untuk ditetapkan dalam Level Cukup. Artinya tidak terlalu mendesak untuk ditetapkan, atau dengan kalimat lain tidak diprioritaskan. Adapun variabel yang memperoleh skor rendah dalam penilaian benteng ini adalah variabel arsitektur, yaitu pada konstruksi dan interior. Kedua variabel ini bila diamati pada benteng Vastenburg menunjukkan konstruksi yang cukup biasa sesuai dengan karakter benteng-benteng kolonial pada waktu itu dan hanya *layout* saja yang mungkin berbeda. Dari sisi interior, tentu saja tidak lagi dapat diamati karena sudah dibongkar beberapa bangunan pendukung di dalamnya.

Variabel lain adalah dalam hal pembiayaan dan kondisi. Untuk membiayai perawatan dan pemeliharaan bangunan ini tentu saja tidak berbeda dengan bangunan baru, sehingga diperlukan pendanaan yang cukup dalam pemeliharannya, selain itu tampak pada bangunan di pintu gerbang barat terdapat rekahan cukup lebar di tembok yang menandakan kurangnya pemeliharaan dan perbaikan.

Skor tertinggi, yaitu 4 diperoleh Benteng Vastenburg dalam kesejarahan. Memang keberadaan benteng-benteng kolonial di banyak tempat di Indonesia tidak terlepas dari kebijakan pemerintahan kolonial yang selalu mengawasi gerak gerak penguasa lokal khususnya dalam hal ini kraton Kasunanan Surakarta, meskipun dilakukan dengan tidak mencolok. Selain itu, keberadaan benteng juga ditujukan untuk aspek keamanan mengingat di Kota Surakarta banyak tinggal etnis Eropa dan bangsa asing lainnya. Pemukiman orang Eropa di Surakarta berada tepat di sebelah timur Benteng Vastenburg.

PENUTUP

Penelitian yang dilakukan dengan model penilaian ini dilakukan dalam rangka pengajuan penetapan sebagai cagar budaya, belum banyak dilakukan. Tetapi kegiatan penilaian terhadap bangunan untuk diajukan agar dapat memperoleh penetapan selalu harus dilaksanakan di Indonesia sebagai amanat dari undang-undang.

Hasil penelitian ini menunjukkan nilai akhir dari bangunan kolonial peninggalan Belanda di Kota Surakarta memberikan rekomendasi untuk ditetapkan dengan level prioritas yang hampir sama. Bangunan markas Denpom Surakarta, Gereja St. Antonius, ex Markas Brigif 6, dan Loji Gandrung adalah bangunan yang direkomendasikan untuk ditetapkan dengan 'Level Kuat', sedangkan Benteng Vastenburg direkomendasikan untuk ditetapkan tetapi hanya dalam 'Level Cukup'. Dalam kenyataannya kelima bangunan tersebut telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya dengan peringkat kota dan satu dengan peringkat nasional (Benteng Vastenburg).

Perbedaan hasil dari nilai akhir setiap penilaian merupakan hal yang wajar mengingat akan adanya perbedaan cara penilaian. Penilaian bangunan untuk direkomendasikan memperoleh penetapan merupakan penilaian yang dilakukan oleh tim ahli yang terdiri atas beberapa ahli dari beberapa disiplin keilmuan yang terkait. Hal ini justru sangat diharapkan jika menggunakan model

penilaian ini, karena masing-masing variabel memiliki domain keilmuan yang berbeda-beda. Di sinilah kerjasama dari tim penilai akan tampak lebih peranannya dengan hasil penilaian yang komprehensif sesuai kompetensi bidang keahlian masing-masing.

Diharapkan pada waktu yang akan datang model penilaian dengan cara ini akan terus diuji cobakan kepada bangunan-bangunan lain di Indonesia dengan mengambil sampel bangunan secara acak, baik bangunan yang telah ditetapkan maupun belum sama sekali. Bahkan dirasakan perlunya penelitian khusus mengenai variabel dan faktor pembobot guna lebih menyempurnakan model penilaian ini ke depannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang dilakukan antara Pusat Arkeologi Nasional dan Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Gadjah Mada (UGM), sehingga tulisan ini dapat terwujud. Selain itu selama berlangsungnya kegiatan juga memperoleh dukungan dan bantuan secara administratif dari Pemerintah Kota Surakarta, khususnya Dinas Tata Kota, Detasemen Polisi Militer Surakarta, dan Detasemen Zeni Bangunan TNI AD di Surakarta. Ucapan terima kasih juga diucapkan untuk anggota peneliti lain dan narasumber selama kegiatan ini, yaitu Sektiadi, Retno Handini dan Kayato Hardani.

DAFTAR PUSTAKA

Balai Konservasi Borobudur. 2014. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan. Balai Konservasi Borobudur.

Bruggen, Van. M.P. dan R.S. Wassing. 1998. *Djokja en Surakarta: Beeld van de Voorstensteden*. Netherland: Asia Maior.
Hardjowigeno, Sarwono dan Widiatmaka. 2011. *Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Tataguna Lahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Kalman, Harold. 1980. *The Evaluation of Historic Buildings*. Ottawa: Minister of The Environment.
- KITLV. 1990. "Fort Vastenburg, Solo". Diunduh 20 Agustus 2018 (<https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/8020240>)
- Kuntowijoyo. 2000. "Making An Old City A Pleasant Place To Stay For Meneer and Mevrouw: Surakarta, 1900-1915". *Humaniora XII*. (2): 139-146.
- Padmo, Soegijanto. 2007. "Sejarah Kota dan Ekonomi Perkebunan". Hlm 1-19 dalam *Makalah dalam Diskusi Sejarah Jogjakarta 11-12 April*. Jogjakarta: Balai Penelitian Sejarah dan Nilai Tradisional.
- Putranto, Andi. 2015a. "Integrasi Foto Udara dan Sistem Informasi Geografis (SIG) untuk Evaluasi Penentuan Letak Bangunan Candi di Wilayah Prambanan, Klaten, Jawa Tengah dan DIY". *Thesis*. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.
- Putranto, Andi. 2015b. "Penilaian Kriteria Bangunan Cagar Budaya Kota Surakarta Berbasis Analisis Kuantitatif Berjenjang Dengan Faktor Pembobot". *Laporan Penelitian*. Yogyakarta: Kerjasama Departemen Arkeologi FIB UGM dengan Pusat Arkeologi Nasional Jakarta.
- Roosmalen, Pauline van. 2003. "Changing Views on Colonial Heritage". *Identification and Documentation of Modern Heritage. UNESCO World Heritage Papers 5*. France: UNESCO World Heritage Centre. Page 121-129.
- Rusdiyana, Novita. 2018. "Bangunan Bank Indonesia Tetap Kokoh Hingga Sekarang". Diunduh 20 Agustus 2018 (<http://surakarta.go.id/?p=9842>).